

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang adalah salah satu negara di Asia yang memiliki perekonomian yang baik dan termasuk ke dalam kategori negara maju. Menurut data CEIC (2017), pendapatan perkapita Jepang adalah sebesar 38,470.75 USD, meskipun turun dibanding tahun sebelumnya, namun Jepang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Selain itu, Jepang juga memiliki tingkat pertumbuhan dan stabilitas nasional yang tinggi, begitu pula dengan standar hidup masyarakat. Dalam indeks kehidupan, Jepang memiliki peringkat di atas rata-rata negara lainnya dalam kekayaan, pendidikan, keterampilan, pekerjaan, pendapatan, keamanan personal, serta kualitas lingkungan (OECD Better Life Index). Hal ini didukung pula oleh kualitas penanganan kesehatan serta pendidikan yang baik. Meski begitu, dalam indeks yang sama pula, dikatakan bahwa Jepang memiliki peringkat di bawah rata-rata dalam hal perumahan, keterlibatan sipil, koneksi sosial, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan dan status kesehatan (OECD Better Life Index).

Dengan kualitas hidup yang rata-rata baik, Jepang bukannya tidak memiliki masalah sosial. Berdasarkan *The Global Gender Gap Report 2017* yang dirilis oleh *World Economic Forum*, Jepang mendapatkan peringkat 114 dalam indeks global kesenjangan gender. Jepang mendapatkan peringkat 114 dari 140 negara dalam partisipasi dan peluang ekonomi. Dalam hal pencapaian pendidikan, Jepang mendapatkan peringkat 74, dan peringkat 1 dalam kesehatan dan keselamatan. Sementara dalam hal pemberdayaan politik, Jepang mendapatkan peringkat 123 (World Economic Forum, 2017). Ketidaksetaraan gender ini dipengaruhi adanya diskriminasi terhadap perempuan, yang merupakan sebuah bentuk kekerasan, khususnya kekerasan gender.

Dalam tulisan North mengenai *Inequality in Japan*, terdapat diskriminasi terhadap perempuan dalam lingkungan bekerja. Praktik dan kebijakan terkait jam kerja perempuan dan ketersediaan *parental leave* untuk pegawai laki-laki kemudian mengatur konteks tersebut secara struktural. Partisipasi tenaga kerja perempuan

menurun selama abad 20, hanya tumbuh sekitar 7% sejak tahun 1970 dibanding pertumbuhan rata-rata 25% menurut *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) (North, 2009). Secara umum, partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan formal (pekerja reguler/tetap) lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Penyebab menurunnya tingkat partisipasi perempuan juga dipengaruhi oleh kebijakan perihal mengandung dan memiliki anak. Laki-laki memiliki jam kerja yang lebih panjang dibandingkan perempuan, menyebabkan tugas mengurus anak diserahkan kepada istri. Bagi istri yang bekerja hal ini merupakan sebuah hambatan, yang menyebabkan kebanyakan perempuan memutuskan berhenti bekerja untuk mengurus anak (North, 2009). Di Jepang juga terdapat istilah ‘atap kaca’ dan ‘lantai lengket’, yaitu sebuah metafora yang merepresentasikan pembatas yang diduga berada dalam distribusi upah perempuan. Pembatas-pembatas ini menghalangi perempuan untuk mencapai tingkat atas dalam bisnis, pemerintahan dan pendidikan dan membiarkan pekerjaan lainnya mendapat upah rendah (Hara, 2017).

Di tahun 2018 terjadi kasus diskriminasi perempuan oleh sebuah institusi pendidikan di Jepang. Universitas Medis Tokyo telah melakukan kecurangan yaitu mengurangi poin yang didapatkan peserta ujian masuk perempuan untuk menjaga rasio mahasiswi di universitas tersebut pada angka 30% (The Japan Times, 2018). Sumber yang sama juga menjelaskan bahwa praktik ini telah berlangsung sejak tahun 2010, yang didasari oleh kebutuhan dokter yang sangat tinggi namun dokter perempuan biasanya akan mengambil cuti melahirkan dalam waktu lama setelah menikah atau berhenti bekerja yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja medis.

Partisipasi perempuan Jepang dalam politik bisa dibilang sangat rendah. Menurut OECD, politik di Jepang sangatlah didominasi oleh laki-laki dengan presentase perempuan di parlemen hanya sebesar 9.5% (OECD, 2017). Pada tahun 2014, kandidat perempuan yang mengikuti pemilihan umum hanya berjumlah 15%, yaitu 169 orang dari 1,093 kandidat yang berasal dari 8 partai utama. Angka ini sangatlah jauh dibanding target 30% posisi pemimpin perempuan baik untuk sektor publik dan swasta yang ingin dicapai pada tahun 2020. Partai yang berkuasa di Jepang, *Liberal Democratic Party* (LDP) memiliki presentase terburuk yaitu hanya

42 kandidat perempuan dari total 352 kandidat partai tersebut (Aoki, 2014). Pada tahun 2016, survey menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Jepang terus melihat adanya kebutuhan akan partisipasi politik yang banyak dari perempuan. Partisipasi yang rendah dalam *Diet* (国会, baca: *kokkai*) (*House of Representative* dan *House of Councillors*), majelis prefektural, serta majelis lokal menyugestikan bahwa pemerintah harus berusaha lebih keras untuk menarik perempuan ke dalam politik (Harris, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud menjelaskan faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender yang diakibatkan oleh kekerasan gender di Jepang dan pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan Jepang dan masyarakat Jepang secara umum menggunakan teori segitiga kekerasan yaitu *direct violence*, *structural violence*, dan *cultural violence* serta pendekatan feminisme, konsep patriarki dan konsep hierarki gender/hegemoni maskulinitas. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya sudut pandang mengenai ketidaksetaraan gender dan segala bentuk kekerasan gender terhadap perempuan di Jepang di era modern ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan yang lebih spesifik yaitu mengapa ketidaksetaraan gender terhadap perempuan masih terjadi di Jepang? Bagaimana ketidaksetaraan gender akibat kekerasan gender terhadap perempuan ini mempengaruhi kehidupan perempuan di Jepang.

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Segitiga Kekerasan Galtung

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu konsep *triangle of violence* atau segitiga kekerasan dari Johan Galtung untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Konsep segitiga kekerasan ini digunakan penulis untuk menjelaskan kekerasan gender serta akibat dari kekerasan gender tersebut. Terdapat tiga tipologi kekerasan dalam konsep segitiga kekerasan Galtung yaitu, kekerasan langsung (*direct violence* atau *personal violence*), kekerasan struktural (*structural violence*), dan kekerasan budaya (*cultural violence*)¹.

Konsep kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya merupakan konsep kekerasan ‘tipe super’ (Galtung, 1990) yang kemudian dapat dikaitkan agar membentuk sebuah segitiga kekerasan yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena kekerasan. Kekerasan langsung, dalam tulisan Galtung, dijelaskan sebagai kekerasan yang berdampak langsung kepada seseorang yang mengalaminya, berupaka kekerasan fisik (*pyshical violence*) yang dalam berbagai bentuk kekerasan—hingga kematian (Galtung, 1969, p. 170).Galtung juga mengatakan bahwa tipe kekerasan langsung mengacu pada adanya aktor yang melakukan tindakan kekerasan secara personal atau langsung. Dalam *Violence, Peace, and Peace Research* (Galtung, 1969, p. 171) Kekerasan struktural mengacu kepada kekerasan tidak langsung—tidak adanya aktor yang melakukan kekerasan secara fisik atau secara langsung. Kekerasan dengan hubungan subyek-obyek yang jelas merupakan kekerasan yang nyata (*manifested*) karena terlihat jelas seperti halnya sebuah aksi. Kekerasan tanpa hubungan subyek-obyek seperti ini adalah kekerasan struktural yang terbangun ke dalam struktur—yaitu pembiaran suatu tindak kekerasan oleh orang-orang yang tidak terlibat kekerasan tersebut secara langsung (Galtung, 1969). Sementara kekerasan budaya dijelaskan oleh Galtung sebagai segala aspek dari sebuah budaya yang dapat digunakan sebagai legitimasi kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan langsung atau kekerasan struktural

¹ Dikutip dari tulisan Johan Galtung: *Cultural Violence* (1994) dan *Violence, Peace, and Peace Research* (1969)

(Galtung, 1990). Dalam tulisan Johan Galtung yaitu *Cultural Violence* (1990), dijelaskan bahwa studi kekerasan budaya menyorot bagaimana kekerasan langsung dan kekerasan struktural, yang terlegitimasi selanjutnya dianggap dapat diterima dalam masyarakat. Dikutip dari tulisan Galtung, kekerasan budaya bekerja dengan cara mengganti moral dari sebuah aksi dari merah/salah menjadi hijau/benar atau setidaknya kuning/dapat diterima, atau membuat kenyataan menjadi buram sehingga kita tidak dapat melihat aksi kekerasan tersebut (Galtung, 1990).

Bentuk segitiga kekerasan Galtung dapat menjelaskan berbagai bentuk kekerasan yang berbeda tergantung bagaimana posisi segitiga itu tersusun atau berdiri. Misalnya, jika segitiga ini berdiri dengan kaki-kaki kekerasan struktural dan kekerasan langsung, kekerasan budaya menjadi legitimasi bagi kedua tipologi kekerasan tersebut. Namun, jika kaki segitiga yang berdiri adalah kekerasan budaya dan kekerasan struktural, kekerasan langsung digambarkan menjadi akibat dari dua tipologi kekerasan di atasnya. Meskipun ketiga sisi ini simetris, terdapat perbedaan mendasar pada tiga konsep kekerasan ini; kekerasan langsung merupakan sebuah *event*, kekerasan struktural merupakan sebuah proses, dan kekerasan budaya merupakan sebuah *invariant*, sebuah kekekalan yang tetap menjadi sama secara esensial dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan sebuah transformasi lambat dalam sebuah budaya mendasar (Galtung, 1990). Kemudian, terdapat 7 aspek yang patut diperhatikan sebagai alat legitimasi dalam kekerasan kekerasan budaya. Galtung menjelaskan ketujuh aspek tersebut adalah: agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu empiris, ilmu formal, dan kosmologi. Ketujuh aspek ini mempenetrasi masyarakat dan secara perlahan merubah keadaan atau tatanan masyarakat sehingga muncul ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan yang bersifat negatif dalam masyarakat.

1.3.2 Feminisme

Teori Feminis berkembang pasca pergerakan perempuan yang umumnya terbagi ke dalam 3 gelombang, *First Wave* (akhir tahun 1800an-awal tahun 1900an), *Second Wave* (tahun 1960-1970an), dan *Third Wave* (tahun 1980an-2000an). Pergerakan perempuan (*The Suffragette Movement*) sebagai dasar feminisme itu sendiri berawal dari perjuangan atas hak politik yang pada saat itu

berupa hak untuk memilih dalam pemilu, yang kemudian berkembang menjadi gerakan feminisme diakhir 1900an dan tidak hanya fokus pada permasalahan perempuan kelas menengah dan dominan ras kaukasia, tetapi juga lebih inklusif dalam permasalahan-permasalahan perempuan kelas bawah, kekerasan domestik kepada perempuan, serta diskriminasi rasial dan seksualitas adalah untuk mencapai kesetaraan secara legal, sosial, dan budaya antara perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender inipun memiliki banyak bentuk tergantung pada stuktur ekonomi dan organisasi sosial dari sebuah masyarakat tertentu dan pada sebuah budaya milik kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat tersebut (Lorber, 2010). Perkembangan teori Feminisme ini juga sejalan dengan munculnya gerakan-gerakan politis oleh dan untuk perempuan, seperti contohnya *Women's Liberation Movement* yang berangkat dari ide feminisme itu sendiri. *Women's Liberation Movement* sendiri adalah sebuah pergerakan sosial paling kontroversial dan merupakan sebuah isu yang sensitif karena pergerakan ini, pada hakekatnya, membahas masalah yang terdapat dalam relasi hubungan antar manusia, khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pandangan khusus yang dapat merubah hubungan tersebut. Feminisme muncul pertama kali pasca pergerakan perempuan di Eropa dan Amerika Utara, yang kemudian dikenal dengan istilah "*Western Feminism*". Kemudian lahirnya kelompok-kelompok feminis lainnya di negara-negara dunia ketiga di Amerika Latin, Afrika, dan Asia yang berusaha melawan bentuk-bentuk opresi paling kasar dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti pemerkosaan, pembunuhan untuk adat, dan kekerasan seksual (Mies, 1998). Pada intinya, baik feminis barat dan feminis negara dunia ketiga menentang sebuah konsep yang sama yaitu konsep patriarki, yang kemudian melahirkan hierarki gender dan polarisasi gender yang mengotak-kotakan laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang berdasarkan 'sifat-sifat' yang diasumsikan dan diasosiasikan dengan identitas gender tersebut.

1.3.3 Konsep Patriarki

Konsep patriarki sendiri merupakan sebuah konsep abstrak yang digunakan untuk menganalisa bentuk-bentuk subordinasi perempuan. Weber (1947) dalam Walby (1989) merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan dimana laki-laki

menguasai masyarakat melalui posisi mereka sebagai kepala rumah tangga. Walby sendiri mendefinisikan patriarki sebagai sebuah sistem struktur sosial dan praktiknya dimana laki-laki mendominasi, menekan, dan mengeksploitasi perempuan. Istilah struktur sosial ini sangat penting ketika membahas konsep patriarki—Walby berpendapat hal tersebut mengimplikasi adanya penolakan terhadap determinisme biologis dan melanggengkan konotasi bahwa setiap laki-laki (secara individu) memiliki kedudukan yang lebih dominan dan setiap perempuan (secara individu) merupakan subordinat (Walby, 1989). Walby juga menganalisis bahwa patriarki memiliki hubungan erat dengan kapitalisme dalam konteks eksploitasi terhadap perempuan—seperti halnya pemberian upah berdasarkan jenis kelamin dan gender. Pemilik modal mempekerjakan perempuan ketika mereka membutuhkan tenaga kerja yang murah karena perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki. Tentu saja hal ini tidak terbatas hanya pada kesenjangan upah namun juga meliputi tuntutan laki-laki terhadap tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk laki-laki. Dalam *Theorising Patriarchy* (1989) oleh Walby dijelaskan mengenai 6 struktur patriarki yang menciptakan patriarki itu sendiri, yaitu, mode patriarki dalam produksi; hubungan patriarki dalam upah tenaga kerja; kekerasan oleh laki-laki; hubungan patriarki dengan seksualitas; dan budaya patriarki. Struktur-struktur inilah yang kemudian merepresentasikan konstelasi yang signifikan dalam relasi sosial yang membangun relasi gender yang dapat membantu untuk membangun pemahaman bentuk-bentuk opresi terhadap perempuan dalam satu waktu dan tempat yang sesuai (Walby, 1989).

1.3.4 Konsep Hierarki Gender/Hegemoni Maskulinitas

Diskursus feminisme membahas terminologi gender diappropriasikan untuk membedakan terminologi biologis dan terminologi psikologis/sosial. Psikologis Robert Stroller pada awalnya menggunakan terminologi seks (kata benda) untuk menjelaskan sifat biologis dan gender untuk menjelaskan kadar feminitas dan maskulinitas yang dimiliki seseorang. Dari sinilah feminis pada akhirnya membedakan seks dan gender dan berargumen bahwa banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan produk sosial. Dalam *Feminist Perspective on Sex and Gender* (2008), Gayle Rubin (1975) menggunakan istilah seks/sistem

gender untuk menjelaskan serangkaian materi biologis genitalia manusia dan prokreasi yang dibentuk dan diintervensi manusia sebagai masyarakat (Mari, 2008). Nicholson (2008) dalam Mari (2008) dalam publikasi yang sama menjelaskan bahwa slogan “gender adalah interpretasi sosial dari seks” merupakan sebuah pandangan dimana masyarakat memaksakan konsepsi budaya bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berperilaku—melalui pemahaman gender sebagai maskulin dan feminin didasarkan pada seks atau organ biologis—organ biologis (*male* dan *female*) kemudian diinterpretasikan oleh budaya secara berbeda dan memproyeksikan norma yang berbeda dan menciptakan orang-orang dengan sifat feminin atau maskulin berdasarkan organ biologis tersebut (Mari, 2008).

Gender bukanlah sesuatu yang lahir bersama kita atau sesuatu yang dimiliki tetapi sesuatu yang dilakukan. Performa gender ini dapat berlaku kepada siapa saja namun masyarakat berusaha mengatur perilaku berdasarkan organ biologis dan fungsinya. Seks sendiri merupakan kategorisasi biologis berdasarkan potensi reproduktif, sementara itu gender merupakan elaborasi sosial dari seks biologis itu sendiri. Kepribadian berdasarkan gender diperlihatkan melalui perilaku stereotip gender yang umum (Chodorov, 1978), pandangan lain berpendapat bahwa kasarnya, gender diciptakan oleh obyektifikasi seksual terhadap perempuan dimana perempuan dipandang dan diperlakukan sebagai obyek untuk memuaskan hasrat laki-laki. Menurut MacKinnon (1989) gender adalah sesuatu yang dikonstruksi secara konstitutif. Posisi dominan laki-laki dan posisi submisif perempuan dalam seksualitas dominan dan submisif mengakibatkan munculnya hierarki yang secara fundamental terikat dengan relasi kuasa seksual. Karenanya, MacKinnon berpendapat bahwa perbedaan gender merupakan sebuah fungsi seksual hierarkis dalam masyarakat yang patriarkis; seksualitas perempuan dan laki-laki dikondisikan sedemikian rupa sebagai obyektifikasi seksual (MacKinnon, 1989). Kesenjangan yang muncul akibat dari dominasi sosial berbentuk hegemoni maskulin dalam masyarakat dapat berupa banyak hal, dengan berbagai bentuk yang berbeda di setiap negara dengan satu persamaan, yaitu, subjugasi perempuan oleh laki-laki dalam spektrum sosio-ekonomi.

1.4 Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis berhipotesis bahwa adanya kekerasan gender terhadap perempuan di Jepang adalah sebagai bentuk kekerasan struktural yaitu terjadinya eksploitasi, diskriminasi, marginalisasi terhadap hak dan kewajiban perempuan di Jepang, yang dilegitimasi melalui budaya masyarakat, yang kemudian memberikan ruang terjadinya kekerasan langsung terhadap perempuan di Jepang. Ketiga rangkaian kekerasan ini kemudian berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat Jepang secara menyeluruh, yang kemudian menciptakan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat kolektif di berbagai bidang, khususnya politik; ekonomi; pendidikan dan keluarga.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah. Proses penelitian melibatkan upaya-upaya seperti pengajuan pertanyaan, pengumpulan data, serta analisa data hingga penafsiran makna dari data yang diperoleh (Creswell, 2016).

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama penelitian ini berupa studi pustaka. Sumber pustaka dapat diambil dari buku, jurnal, maupun media lainnya seperti internet dengan tetap mengutamakan kredibilitas sumber untuk menunjang penulisan penelitian ini. Sedangkan, untuk metode analisis data penulis akan menggunakan metode analisis proses interpretasi data. Proses interpretasi data adalah proses yang dilakukan peneliti mulai dari setelah data berhasil dikumpulkan, dipilah, dikategorikan, dan ditafsirkan supaya sesuai dengan tujuan penelitian.

1.5.2 Teknik Analisis Data

Metode *process-tracing* digunakan penulis dalam penelitian ini. Metode ini meneliti mekanisme tentang bagaimana suatu 'sebab' menghasilkan 'akibat'. Peneliti memfokuskan penelitian pada variabel

antara (*intervening variable*) yang ‘menjembatani’ antara variabel independen dan dependen (George & Bennett, 2005). Penelitian ini bersifat deskriptif yang dijelaskan dengan metode analisis process tracing. Metode ini digunakan karena dapat menjelaskan mengenai sebab akibat dari fenomena yang diteliti oleh penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan kerangka dan dasar-dasar penelitian.

Bab kedua merupakan deskripsi kasus secara umum, dalam bab ini akan dijelaskan apa itu kekerasan gender secara lengkap dan bagaimana bentuk kekerasan gender terjadi di Jepang. Hal-hal yang akan dijelaskan antara lain adalah keterkaitan kekerasan gender terhadap perempuan dengan ketidaksetaraan gender yang mengancam dan mempengaruhi aspek-aspek keamanan manusia perempuan di Jepang.

Bab ketiga merupakan analisis untuk melihat alasan atau penyebab terjadinya kekerasan gender terhadap perempuan di Jepang yang akan dianalisis melalui kerangka pemikiran feminisme, konsep patriarki, konsep hegemoni maskulinitas/hierarki gender dan kekerasan struktural, budaya, dan langsung.

Bab keempat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Dalam bab ini akan dipaparkan hasil dari temuan penelitian, yaitu pembuktian apakah hipotesa awal penulis terbukti dan sesuai dengan hasil penelitian atau tidak. Bab ini juga akan berisi evaluasi serta rekomendasi terhadap penelitian untuk penelitian lebih lanjut.